

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2014, sebanyak 32,9% dari populasi penduduk Indonesia berusia 0-17 tahun.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa satu dari tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Anak adalah karunia bagi keluarga maupun negara yang harus dijaga dan dilindungi. Pemerintah menempatkan perhatian lebih pada permasalahan perlindungan anak, salah satunya adalah tekad pemerintah dalam rangka mencapai target *Sustainable Development Goals* (SGDs). Target pencapaian pemerintah tersebut diantaranya adalah mengenai pengentasan masalah kemiskinan anak, pemenuhan gizi dan pendidikan anak.

Potensi anak di Indonesia perlu untuk dikembangkan. Penting untuk mempersiapkan masa depan anak dan memberikan mereka kesempatan agar dapat mengembangkan potensi secara optimal (Pardede & Pinem, 2016). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung keterlibatan anak dalam mengenyam pendidikan. Pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah

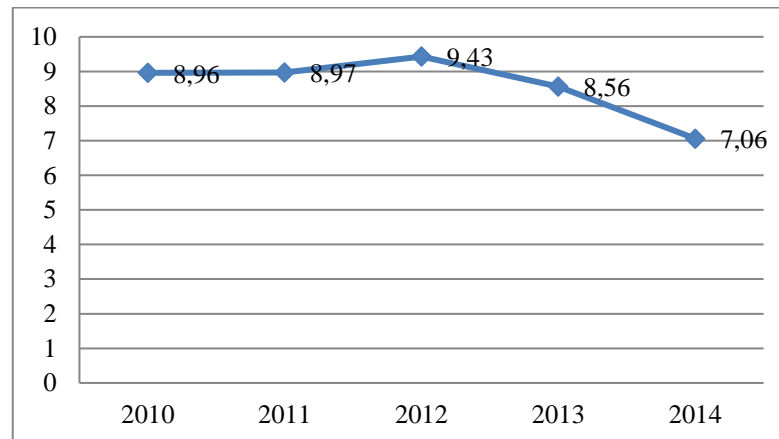
¹ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035*

anak usia 5-17 tahun di Indonesia mencapai 83,83%.² Selebihnya adalah anak yang tidak bersekolah atau sedang melakukan kegiatan lain seperti bekerja.

Fenomena pekerja anak menjadi permasalahan di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2009), pekerja anak adalah semua anak yang sedang melakukan pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada anak, baik fisik maupun emosionalnya, yakni dengan mengeksploitasi atau mencegah mereka untuk mengenyam pendidikan. Anak-anak yang semestinya mengenyam pendidikan justru harus terlibat pada dunia kerja yang berpotensi membahayakan mereka. Anak dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan minimal selama satu jam berturut-turut dalam rentan waktu satu minggu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Pada tahun 2014, angka pekerja anak di Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagaimana pada Gambar 1.1. Pada tahun 2010, anak usia 10-17 tahun yang telah bekerja mencapai 8,96%. Kemudian pada tahun 2011, angkanya mengalami peningkatan menjadi 8,97%. Angka pekerja anak kemudian naik mencapai 9,43% pada tahun 2012, lalu dua tahun berikutnya mengalami penurunan berturut-turut, yakni masing-masing pada tahun 2013 sebesar 8,56 % dan 7,06% pada tahun 2014. Hal ini mengkhawatirkan melihat pekerja anak masih menjadi tren dari tahun ke tahun.

² Sakernas, 2015.



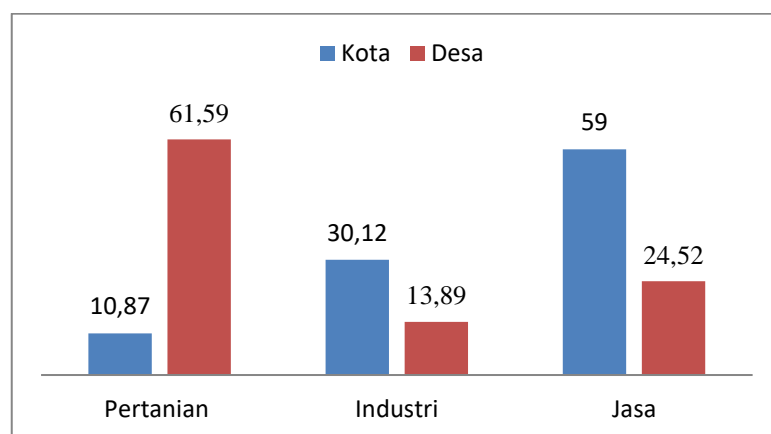
Sumber: Sakernas, BPS

Gambar 1.1
Presentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Tahun 2014

Pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan *International Labor Organization* (ILO) pada tahun 1992 untuk mencegah dan menghapus praktik pekerja anak. Sementara itu, hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28B yang berbunyi bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meski demikian, masih terdapat banyak praktik pekerja anak yang terjadi di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa.

Pada wilayah perkotaan, sebagian besar anak bekerja di sektor jasa dengan persentase mencapai 59%, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 24,52% sebagaimana pada Gambar 1.2. Adapun, di wilayah pedesaan mayoritas pekerja anak berada di sektor pertanian, yakni mencapai 61,59%, sedangkan di perkotaan hanya 10,87%. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan latar

belakang kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan banyak bergerak pada sektor sekunder dan tersier seperti sektor industri dan jasa, sedangkan masyarakat di pedesaan mayoritas beraktivitas di sektor primer seperti sektor pertanian (Purwanti, 2014).



Sumber: Sakernas, BPS

Gambar 1.2
Presentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Tahun 2014

Sebanyak 55,78% anak usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja tidak lagi bersekolah.³ Seperti yang disebutkan oleh Baland dan Robinson (2000) dalam temuannya bahwa angka putus sekolah erat kaitannya dengan pekerja anak. Hal ini mengingat anak-anak yang gagal dalam pendidikan lebih terdorong untuk bekerja dan anak-anak yang sekolah sambil bekerja biasanya prestasinya akan menurun kemudian putus sekolah.

³ Sakernas, 2015.

Tidak terjangkau biaya pendidikan menjadi penyebab utama adanya kasus anak putus sekolah (Badan Pusat Statistik, 2009). Pada kenyataannya, pemerintah telah berupaya menyediakan berbagai program yang dapat diakses masyarakat untuk menunjang pendidikan di mana salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005. Selain itu, diluncurkan juga Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan tunai bersyarat yang mengharuskan penerima bantuan untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan dasar hingga selesai pada tahun 2007. Artinya, perlu ditelaah kembali terkait penyebab anak memilih untuk bekerja dan meninggalkan pendidikannya.

Pada tahun 2013, tercatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah yaitu hanya sebesar 21,8% masyarakat yang tergolong *well literate*.⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *well literate* sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian terhadap lembaga dan produk jasa keuangan. Terkait dengan pendidikan anak, Putri & Miharti (2021) dalam temuannya menyebutkan bahwa literasi keuangan akan memengaruhi perencanaan keuangan orang tua mengenai pendidikan anak. Semakin tinggi literasi keuangan seseorang, maka akan semakin baik perencanaan keuangan untuk dana pendidikan anak. Dengan begitu, perencanaan dana pendidikan yang baik memiliki manfaat untuk menghindari anak masuk dalam eksploitasi dunia kerja.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Orang tua semestinya mengarahkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan dan melindungi anak dari hal yang merugikan mereka. Dalam Islam, perintah untuk melindungi keluarga telah ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Surat At Tharim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tharim ayat 6)

Hal ini menjadi penting bagi orang tua untuk memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat merencanakan pendidikan anak-anak mereka dan menjauhkan dari potensi pekerja anak. Deb & Rosati (2002) menyebutkan bahwa orang tua memiliki peran dalam pengambilan keputusan untuk mengirim anaknya ke dalam dunia kerja. Literasi keuangan mampu memengaruhi sikap seseorang dalam hal menabung, melakukan pinjaman, investasi, dan mengatur keuangan pribadinya (Widdowson & Hailwood, 2007). Orang-orang harus merencanakan investasi jangka panjang, tabungan, dan pinjaman untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka (Chen & Volpe, 1998).

Di samping itu, karakteristik rumah tangga turut berhubungan dengan fenomena pekerja anak (Ardana *et al.*, 2016). Hal ini selaras dengan penelitian

Rad *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa usia ibu mampu memengaruhi kemungkinan munculnya pekerja anak. Khan (2003) juga menyebutkan dalam temuannya bahwa ukuran rumah tangga, usia orang tua, dan kepemilikan aset berpengaruh terhadap munculnya pekerja anak. Selain itu, Fahlevi (2020) menyebutkan bahwa perbedaan jenis kelamin memiliki keterkaitan dengan kecenderungan anak untuk bekerja. Berkaitan dengan tempat tinggal, Ersado (2005) menemukan bahwa minimnya infrastruktur di daerah pedesaan akan mendorong anak untuk bekerja dibandingkan sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara literasi keuangan orang tua dengan fenomena pekerja anak di Indonesia. Melihat fenomena pekerja anak sampai saat ini masih menjadi tren, sementara indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia juga masih rendah. Literasi keuangan orang tua dalam hal ini diukur oleh pengetahuan mengenai Lembaga penyedia pinjaman dan kepemilikan tabungan. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor lain sebagai variabel kontrol, yakni ukuran keluarga, usia orang tua, jenis kelamin anak, tempat tinggal, dan status kepemilikan tanah (aset). Penelitian ini penting mengingat sejauh ini belum ada penelitian serupa di Indonesia yang mengaitkan fenomena pekerja anak dengan literasi keuangan orang tua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai lembaga penyedia pinjaman terhadap pekerja anak di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan tabungan terhadap pekerja anak di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ukuran keluarga terhadap pekerja anak di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh usia ayah terhadap pekerja anak di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh usia ibu terhadap pekerja anak di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh jenis kelamin anak terhadap pekerja anak di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh tempat tinggal terhadap pekerja anak di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh status kepemilikan tanah terhadap pekerja anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan mengenai lembaga penyedia pinjaman terhadap pekerja anak di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan tabungan terhadap pekerja anak di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran keluarga terhadap pekerja anak di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh usia ayah terhadap pekerja anak di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh usia ibu terhadap pekerja anak di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh jenis kelamin anak terhadap pekerja anak di Indonesia.
7. Untuk menganalisis pengaruh tempat tinggal terhadap pekerja anak di Indonesia.
8. Untuk menganalisis pengaruh status kepemilikan tanah terhadap pekerja anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan fenomena pekerja anak di Indonesia dan apa saja faktor penyebabnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak turut andil dalam fenomena pekerja anak dan dapat mencegah terjadinya fenomena tersebut di lingkungan sekitar.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan fenomena pekerja anak di Indonesia.